

**PENGUNAAN *INDIRECT EVIDENCE* OLEH KOMISI PENGAWAS
PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PROSES PEMBUKTIAN DUGAAN
PRAKTIK KARTEL
(Studi Putusan No. 24/KPPU-I/2009)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum
(UIN) Alauddin Makassar

Oleh :

NURAENI
NIM.10400115020

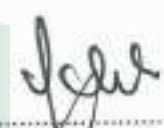


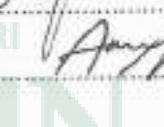


**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2019**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Penggunaan *Indirect Evidence* Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktek Kartel (Studi Putusan No.24/KPPU-I/2009)**" yang disusun oleh Nuraeni, NIM: 10400115020, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 21 Agustus 2019 M
20 Dzulhijjah 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr.H.Muammar Muhammad Bakry, Lc, M.Ag. (.....)	
Sekretaris	: Istiqamah, S.H., M.H. (.....)	
Munaqisy I	: Dr. Fadli A. Natsif, S.H, M.H (.....)	
Munaqisy II	: St. Nurjannah, S.H., M.H (.....)	
Pembimbing I	: Erlina, S.H, M.H (.....)	
Pembimbing II	: Ashar Sinilele, S.H., M.H (.....)	

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,


Dr.H.Muammar Muhammad Bakry, Lc, M.Ag.
NIP. 19731122 200012 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuraeni
Nim : 10400115020
Tempat/Tgl. Lahir : Bongkitonro 14 Juli 1997
Jurusan/Konsentrasi : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
Fakultas/Program : Syari'ah dan Hukum/ Strata Satu
Alamat : Jl. Dato Ripanggentungang
Judul : Penggunaan *Indirect Evidence* Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel (**Studi Putusan No. 24/KPPU-I/2009**)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2019

Penyusun,

Nuraeni
Nim : 10400115020

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh

Segala puji Allah *Subhana wata'ala*, Rabb bagi seluruh alam semesta, yang memberi nikmat bagi setiap manusia nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat tak kalah pentingnya nikmat keimanan yang dititipkan pada insan pilihanNya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* yang telah membawa kita kejalan yang lurus seperti yang kita rsakan saat ini.

Skripsi ini berjudul Penggunaan *Indirect Evidence* Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel (Studi Putusan No. 24/KPPU-I/2009) merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Strata 1 (S1) program studi Ilmu Hukum pada fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar.

Atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan skripsi ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah dengan pertolongan Allah SWT dan do'a orang tua yang selalu menyertai penulis membuat penulis mampu menyelesaikan

skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Kamaruddin dan ibunda Nur Lia atas do'a, dukungan, cinta dan kasih yang tak pernah putus diberikan yang tidak mampu penulis membalasnya hingga kapanpun. Dan terimakasih teruntuk suami tercinta Gazali yang tidak dapat dipungkiri bahwa dia adalah bagian dari motivasi terbesar penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Erlina, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Ashar Sinilele, S.H, M.H selaku pembimbing II atas segala arahan, petunjuk, motivasi, dan bimbingan yang diberikan dengan penuh kesabaran hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada dosen penguji dalam ujian skripsi ini yakni Bapak Dr. Fadli Andi Natsif S.H., M.H selaku penguji I dan Ibu St. Nurjannah S.H., M.H selaku penguji II.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga, sahabat, dan rekan-rekan yang telah memberi motivasi, nasihat, saran dan kritik yang membangun kepada penulis sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terimakasih dan hormat setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhanis., S.H., P.Hd., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;

2. Bapak Dr.H.Muammar Muhammad Bakry, Lc, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Ibu Istiqamah, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar;
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
5. Teman-teman rasa saudaraku (Hilmiah,S.H., Hajrahwati Gama,S.H., Alvi Anggriani dan Siti Nurhaliza z) yang telah menemani saya dalam suka duka.
6. Keluarga besar VON15 Angkatan 2015 Ilmu hukum terimakasih atas motivasi dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis;
7. Kepada Dedi Aswandi yang telah meminjamkan notebooknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dengan penuh kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan agar dapat bermanfaat untuk semua orang.

Samata, Agustus 2019
Penyusun

Nuraeni

DAFTAR ISI

KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Pembuktian Dalam Pemeriksaan Perkara di KPPU	11
1. Pengertian Pembuktian.....	11
2. Alat-Alat Bukti Yang Digunakan Oleh KPPU.....	12
B. Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) Oleh KPPU	20
1. Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) dalam Proses Pembuktian menurut Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia.....	22
2. Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) oleh KPPU dalam Membuktikan Adanya Dugaan Kartel	24

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Dan Lokasi Peneltian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	37
A. Perkara yang Telah Diputuskan di KPPU	37
B. Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) Oleh KPPU dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktek Kartel dalam Putusan KPPU No.24/KPPU-I/2009.....	38
a) Duduk perkara.....	38
b) Pertimbangan Hukum Majelis Komisi KPPU.....	43
c) Diktum/Amar Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009.....	52
C. Kekuatan Hukum Pembuktian Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) yang Digunakan Oleh KPPU.....	62
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

ABSTRAK

Nama : Nuraeni
Nim : 10400115020
Judul : Penggunaan *Indirect Evidence* (Alat Bukti Tidak Langsung) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel (Studi Putusan No. 24/KPPU-I/2009)

Pokok masalah yang penulis angkat pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan penggunaan minimal alat bukti dalam proses pembuktian dalam hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 5 dan Pasal 11 UU No.5 Tahun 1999 terhadap kartel minyak goreng yang kemudian dirumuskan dalam beberapa sub masalah yaitu : 1. Bagaimana penggunaan *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) oleh KPPU dalam proses pembuktian dugaan praktek kartel (Studi Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009)? 2. Bagaimana kekuatan pembuktian *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) yang digunakan oleh KPPU dalam proses pembuktian dugaan praktik kartel?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Putusan Majelis Komisi yang menyatakan bahwa benar telah terbukti adanya pelanggaran pasal 4, pasal 5 dan pasal 11 UU Nomor 5 tahun 1999 yaitu masing-masing tentang praktek oligopoli, penetapan harga, dan kartel oleh Majelis Komisi dengan menggunakan *indirect evidence* untuk membuktikannya **dapat diterima**, dengan syarat bahwa bukti komunikasi dan bukti ekonomi tersebut berkesesuaian dengan alat bukti yang sah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. (2) Kekuatan hukum pembuktian *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) belum diatur oleh Undang-Undang Antimonopoli, tetapi sudah diatur dalam Pasal 57 Perkom baru No.1 Tahun 2019. Petunjuk atau *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) dapat dijadikan sebagai alat bukti asalkan petunjuk itu mempunyai kesesuaian dengan alat bukti lainnya, atau sesuai dengan perbuatan atau perjanjian yang diduga melanggar undang-undang persaingan usaha. Sesuatu petunjuk yang didapat dalam bentuk tertulis, kekuatan pembuktiannya dikategorikan sama dengan kekuatan pembuktian surat atau dokumen. Penggunaan alat bukti dalam perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tidak dapat disamaratakan, tetapi ditentukan kasus per kasus.

Kata Kunci : *Indirect Evidence, Kartel, KPPU*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi dimana pihak pemerintah dan swasta saling bekerjasama dalam menjalankan roda perekonomian di suatu negara. Sistem ekonomi ini memperbolehkan pihak swasta untuk melakukan aktivitas perekonomian namun campur tangan pemerintah dapat dilakukan. “ Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi.”¹

Pesatnya perkembangan dunia persaingan usaha perlu diimbangi dengan iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang wajar. pada akhirnya setiap orang akan menikmati iklim usaha yang di bangun atas dasar persaingan yang sehat dan fair.²

Campur tangan pemerintah tersebut bertujuan agar kegiatan ekonomi dapat memberikan manfaat nyata dan kemakmuran bagi masyarakat umum sehingga dapat memperbaiki sistem perekonomian di negara ini. Kebijakan ekonomi ini memanfaatkan instrumen-instrumen pasar dan persaingan dalam membangun ekonomi bangsa. Negara sebagai pembentuk kebijakan mengarahkan masyarakat

¹ Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 73.

² Nurjannah, St. "Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal (Ditinjau dari UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)", Al:Daulah: *Jurnal Ilmu Hukum* 4 : 1 (2017).

untuk menjalankan persaingan usaha yang sehat, yaitu persaingan usaha tanpa ada keberpihakan pada golongan tertentu dan pasar yang membentuk harga secara alamiah. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku ekonomi tertentu agar menjamin setiap orang yang berusaha di Indonesia berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar adalah salah satu tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dari kegiatan maupun perjanjian diantara para pelaku usaha salah satunya kartel. Menurut ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 5/1999, perjanjian kartel adalah kerjasama antara dua orang pengusaha yang saling bersaing yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan masyarakat luas dan memicu terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Alasan dilakukannya perjanjian kartel ini yaitu untuk meniadakan persaingan diantara kedua pelaku usaha tersebut.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menangani suatu kasus berkenaan dengan UU No. 5 tahun 1999 memiliki prosedur tersendiri dalam beracara. Proses tersebut melewati beberapa tahapan, yang kurang lebih dapat diklasifikasi sebagai berikut : tahap pengumpulan indikasi, tahap pemeriksaan pendahuluan, tahap pemeriksaan lanjutan, tahap pemeriksaan putusan, dan tahap eksekusi putusan.

Namun dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh KPPU adalah dengan mencari kebenaran materil, yang mana berbeda dengan hukum perdata yang mencari kebenaran formil. Kebenaran materil adalah kebenaran yang bersumber dari kaidah-kaidah yang diatur dalam perundang-undangan. Dengan adanya kebenaran formil maka akan membuktikan adanya akibat atau dampak dari persaingan usaha tidak sehat tersebut. KPPU terlebih dahulu akan melakukan penelitian, pengawasan, penyelidikan, dan pemeriksaan untuk memastikan kebenaran atas laporan atau inisiatif KPPU atas dugaan terjadinya praktek kartel.

Ada lima alat bukti yang dapat digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, telah disebutkan dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu; keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha. Alat bukti langsung ini pun diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 184 dan HIR pasal 164.

Dalam hukum acara persaingan usaha dikenal istilah *direct evidence* (alat bukti langsung) dan *indirect evidence* (alat bukti tdk langsung). Tetapi terdapat beberapa permasalahan yang muncul karena penggunaan *indirect evidence*(alat bukti tidak langsung) dalam kasus dugaan praktek kartel. Dalam hukum pidana “satu bukti bukan bukti” (*unus testis nullus testis*). Minimal alat bukti yang sah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu dua alat bukti. Sedangkan dalam pasal 11 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan usaha disebutkan bahwa “ KPPU

harus berupaya memperoleh satu atau lebih alat bukti”.³ Bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa satu alat bukti cukup untuk menindaklanjuti laporan ataupun dugaan adanya indikasi kartel. Ketidaksesuaian antara hukum acara pidana dan hukum persaingan usaha dalam hukum pembuktian inilah yang menjadi latar belakang penulisan skripsi ini. Hukum acara pidana menggunakan *direct evidence* sebagai bukti utama dalam hukum acara pidana, sedangkan dalam hukum persaingan usaha menggunakan *indirect evidence* sebagai dasar utama pembuktian di dalam hukum persaingan usaha. Beberapa keputusan KPPU yang mendasarkan pembuktian dengan dalil bukti-bukti *indirect evidence* antara lain terjadi pada kasus minyak goreng, kepemilikan silang temasek , tender give away haji, dan beberapa kasus kartel.

Pada 25 November 2011, sebanyak 20 perusahaan lolos dari tuduhan kartel minyak goreng. Padahal , KPPU telah menetapkan 20 produsen minyak goreng itu bersalah dan menetapkan hukuman denda senilai Rp 299 miliar. Para produsen minyak goreng dinyatakan melakukan kartel harga sepanjang April-Desember 2008. Dari kacamata hukum persaingan usaha, tindakan ini telah merugikan masyarakat sedikitnya Rp 1,27 triliun untuk produk minyak goreng kemasan bermerek dan Rp374,3 miliar untuk produk minyak goreng curah. Para pengusaha tidak terima dengan putusan KPPU, mereka ramai-ramai mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta pusat. Di pengadilan, KPPU kalah, putusan lembaga wasit persaingan usaha ini dibatalkan. Alasannya, pembuktian yang dilakukan KPPU dianggap tak

³ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 11 tentang Kartel berdasarkan UU No. 5 tahun 1999, Copyright@KPPU, 2011, Hal 23.

cukup kuat sebab tak ada bukti tidak langsung, untuk menjerat pelaku kartel. Memang dalam membuktikan kartel minyak goreng itu, KPPU menggunakan *indirect evidence* atau bukti tidak langsung. Pembuktian jenis ini lazim digunakan dalam membuktikan praktik kartel di seluruh dunia. KPPU kemudian mengajukan banding atas putusan pengadilan yang melemahkan putusan kartel itu. Namun sayang, Mahkamah Agung pun menolak banding KPPU dengan alasan yang sama dengan pengadilan negeri.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Jl. Urip Sumiharjo, Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan guna untuk melihat penggunaan *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) oleh KPPU dalam proses pembuktian dugaan praktek kartel di kota Makassar.

2. Deskripsi Fokus

Adapun judul skripsi ini adalah : “ Penggunaan *Indirect Evidence* (Alat Bukti Tidak Langsung) Oleh KPPU Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktek Kartel (Studi Kasus KPPU Kota Makassar)”. Dapat diberikan pengertian sebagai berikut agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian dari beberapa variabel yang dianggap penting.

a. Penggunaan : penggunaan memiliki satu arti. Penggunaan berasal dari kata guna.

Penggunaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga

penggunaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Penggunaan berarti proses, cara, perbuatan menggunakan sesuatu, pemakaian.

b. *Indirect Evidence* (Alat bukti tidak langsung) : **Alat Bukti Tidak Langsung** adalah **pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik**, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan. Yang termasuk pada kelompok ini adalah alat bukti persangkaan (*vermoeden*).⁴

c. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

- **Komisi** : Komisi adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Komisi memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga komisi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan
- **Pengawas** : Pengawas adalah orang yang menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
- **Persaingan** : Pengertian persaingan adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan dapat terjadi apabila beberapa pihak menginginkan sesuatu yang terbatas atau sesuatu yang menajadi

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

pusat perhatian umum. Persaingan berlangsung tanpa ancaman atau kekerasan.⁵

- Usaha : Usaha atau kerja adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak.⁶

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU no. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU bertanggungjawab kepada Presiden.⁷

- d. Proses : Proses adalah runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu: rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk; perkara dalam pengadilan.⁸
- e. Pembuktian : Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.
- f. Dugaan : Dugaan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Dugaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga dugaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

⁵ Atom, <https://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-persaingan.html> , 18 Desember 2018

⁶[https://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_\(fisika\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_(fisika)) ,18 Desember 2018

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pengawas_Persaingan_Usaha, 18 Desember 2018

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

- g. **Prakik** : Praktik adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Praktik memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga praktik dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.
- h. **Kartel** : Kartel adalah kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga, untuk membatasi suplai dan kompetisi. Berdasarkan hukum anti monopoli, kartel dilarang di hampir semua negara.⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka pokok masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) oleh KPPU dalam proses pembuktian dugaan praktek kartel (Studi Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009)?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) yang digunakan oleh KPPU dalam proses pembuktian dugaan praktik kartel?

D. Kajian Pustaka

Secara umum, kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan momentum bagi calon peneliti untuk mendemostrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan agar calon peneliti mampu mengidentifikasi kemungkinan

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kartel>, 18 Desember 2018

signifikan dan kontribusi akademik dari penelitiannya pada konteks waktu dan tempat tertentu.

Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penulis dapat mengemukakan beberapa referensi yang dijadikan rujukan dalam mengkaji masalah terkait dengan judul tersebut, antara lain :

1. Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga.2005. ***Hukum Acara Persaingan Usaha***. Jakarta: PT. Arya WD.
2. M. Yahya Harahap. 2016. ***Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan***. Jakarta: Sinar Grafika
3. M.Natsir Asnawi.2013. ***Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia***. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta.
4. Riduan Syahrani.2009. ***Materi Dasar Hukum Acara Perdata***. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan :

- a. untuk mengetahui penggunaan *Indirect Evidence* (Alat Bukti Tidak Langsung) Oleh KPPU dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktek Kartel dalam Putusan KPPU No.24/KPPU-I/2009.
- b. untuk mengetahui kekuatan pembuktian *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) yang digunakan oleh KPPU dalam proses pembuktian dugaan praktik kartel.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai Penggunaan *Indirect Evidence* (Alat Bukti Tidak Langsung) Oleh KPPU dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktek Kartel di kota Makassar. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam rangka memperkaya referensi dalam penelitian di masa depan dan sebagai bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat sebagai rancangan undang-undang baru tentang Penggunaan *Indirect Evidence* (Alat Bukti Tidak Langsung) dalam hukum persaingan usaha dan dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.H) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pembuktian dalam pemeriksaan perkara di KPPU

1. Pengertian Pembuktian

Untuk memenangkan suatu perkara di pengadilan maka pihak-pihak yang berperkara harus mengemukakan peristiwa-peristiwa di depan persidangan yang bisa dijadikan dasar untuk menguatkan haknya. Namun tidak cukup hanya dikemukakan begitu saja, baik secara tertulis ataupun lisan, akan tetapi harus disertai bukti-bukti yang sah menurut hukum agar kebenarannya dapat dipastikan. Jadi, peristiwa-peristiwa tersebut harus disertai pembuktian secara yuridis.

Pembuktian (Inggris: evidentiary; Belanda: bewijs) berasal dari kata bukti, yang berarti keterangan nyata; sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Pembuktian menurut R. Subekti adalah upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Sementara itu, menurut Nashr Farid Washil, pembuktian merupakan upaya atau kegiatan menampilkan alat-alat bukti yang sah berdasar hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna menetapkan apakah seseorang itu memiliki hak atau tidak.¹ Jadi dapat disimpulkan, pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah

¹ M. Natsir Asnawi, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2013, Hal.1

menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.²

2. Alat-Alat Bukti yang digunakan oleh KPPU

Dalam proses pemeriksaan, KPPU memerlukan bukti-bukti bahwa pelaku usaha yang bersangkutan melanggar Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan pelaksanaannya. Adapun alat-alat bukti yang digunakan oleh KPPU berbeda dengan alat-alat bukti yang digunakan hukum acara perdata, tetapi mirip dengan alat-alat bukti yang digunakan hukum acara pidana, tercantum di dalam KUHAP. Dalam Pasal 42 UU No. 5 tahun 1999 jo. Pasal 72 Peraturan Komisi No. 1 tahun 2010, alat-alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan KPPU terdiri atas:³

a. Keterangan saksi

Dalam praktiknya, pihak-pihak yang diperiksa, baik itu saksi ataupun pelaku usaha yang ditetapkan sebagai terlapor, wajib untuk memberikan keterangan. Namun demikian, pemberian keterangan ini sering dilakukan dengan tidak disumpah terlebih dahulu karena UU Antimonopoli dan Kep. No. 05 tidak mewajibkan pihak-pihak yang didengar keterangannya harus disumpah terlebih dahulu.

Untuk memahami pengertian dari keterangan saksi dalam lingkup hukum persaingan usaha, perlu kita lihat ketentuan hukum acara pidana sebagai

²H. Riduan Syahrani, Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2009, Hal. 14

³Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha, Jakarta: PT. Arya WD, 2005, Hal. 42

perbandingan. Di dalam ketentuan KUHAP Pasal 1 ayat 27 dikatakan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Sahnya pemberian keterangan oleh saksi ataupun pihak lain ini menjadi penting karena keterangan mereka akan dijadikan pertimbangan oleh KPPU dalam membuat putusan. Dalam praktiknya, keterangan dari saksi tersebut ada yang disumpah dan ada yang tidak disumpah. UU Antimonopoli, Kep. No.5 dan perma No.01 tahun 2003, tidak mengatur lebih lanjut keterangan saksi yang bagaimana yang dapat diterima oleh majelis KPPU.⁴

Di Dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai saksi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan bahwa didalam Undang-undang no.8 tahun 1981 tentang KUHAP bahwa syarat minimal saksi agar dapat menjadi bukti adalah dua orang saksi. Pada peraturan Komisi pengawas persaingan usaha no. 1 tahun 2010 pada pasal 73 dikatakan bahwa saksi yang tidak boleh didengar keterangannya adalah keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terlapor dan atau pelapor, istri atau suami, anak yang belum berusia tujuh belas tahun, atau orang sakit ingatan. Perkom no. 1 tahun 2010 juga mengatakan jika keterangan dari pihak tersebut diperlukan, maka ketua majelis komisi dapat meminta pihak tersebut untuk

⁴ Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, Hukum Acara Persaingan Usaha, Jakarta: PT. Arya WD, 2005, Hal. 44

didengar keterangannya. Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan saksi yang diberikan di dalam persidangan. Pada hukum acara perdata di dalam pasal 169 HIR diatur tentang syarat minimal keterangan saksi dalam hukum pembuktian, yaitu seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai alat bukti yang cukup (*unus testis nullus testis*). Maksud pasal ini bukanlah mengharuskan supaya tiap-tiap peristiwa dibuktikan dengan lebih dari seorang saksi, melainkan bagi perkara seluruhnya seorang saksi saja dengan tidak ada bukti lain adalah tidak cukup. Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara di pasal 104 undang-undang peradilan tata usaha negara disebutkan bahwa keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar saksi sendiri.

b. Keterangan Ahli

KPPU memerlukan pendapat dari seorang ahli agar dapat menghasilkan suatu keputusan yang baik tentang suatu perkara yang sedang diperiksa. Pelaku usaha yang dihukum dapat menghadirkan seorang ahli yang berupa seorang saksi atau pun KPPU sendiri yang menghadirkan ahli tersebut.

Keterangan ahli merupakan alat bukti yang digunakan dalam pembuktian pada hukum acara persaingan usaha. Undang-undang No.5 tahun 1999 tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai saksi ahli ini. Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal. Definisi ahli menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang yang ahli, paham sekali di suatu

ilmu (kepandaian).⁵ Pada Perkom No. 1 tahun 2010 pada pasal 75 menjelaskan bahwa orang yang dapat menjadi ahli diwajibkan memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat yang berkaitan dengan keahliannya tersebut ataupun memiliki pengalaman yang sesuai dengan keahliannya.⁶ Pendapat ahli yang dianggap sebagai bukti merupakan pendapat yang dikemukakan dalam sidang majelis. Seseorang yang tidak boleh menjadi saksi, tidak boleh memberikan pendapat sebagai ahli. Bantuan yang dapat diberikan oleh para ahli tersebut adalah untuk menjelaskan tentang bukti-bukti yang ada berkaitan dengan dugaan pelanggaran undang-undang persaingan. Apabila dibandingkan dengan hukum acara perdata, keterangan ahli diatur dalam pasal 154 HIR, yang menentukan, bahwa apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya dapat dijelaskan oleh seorang ahli, maka atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya pengadilan dapat mengangkat seorang ahli. Ahli itu diangkat oleh hakim untuk diminta pendapatnya. Keterangan ahli diperlukan untuk memperjelas perkara di bidang persaingan usaha guna kepentingan pemeriksaan mengenai dugaan adanya pelanggaran undang-undang persaingan. Sebagai perbandingan dengan keterangan ahli dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Ketentuan mengenai ahli diatur dalam pasal 102 dan 103 UU PTUN, keterangan ahli adalah pendapat orang diberikan dibawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.

c. Surat atau dokumen

⁵ <http://kamusbahasaIndonesia.org/ahli>, diakses pada 2 Agustus 2019.

⁶ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 tahun 2010, Pasal 75

Ketentuan pasal 42 butir c UU Anti Monopoli dan penjelasannya tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai surat atau dokumen seperti apa dan bagaimana yang dapat dijadikan alat bukti. Ketentuan Pasal 42 UU Antimonopoli ini sendiri banyak kemiripannya dengan ketentuan alat-alat pembuktian pada KUHAP.

Menurut Soedikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan surat tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksud untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁷

Menurut Indroharto termasuk dalam pengertian surat atau tulisan adalah hasil dari pemeriksaan persiapan guna mematkan perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan nanti.⁸ Berkaitan dengan alat bukti surat, perkom No. 1 tahun 2010 pasal 76 menjelaskan mengenai surat atau dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Surat atau dokumen yang dapat digunakan sebagai alat bukti terdiri dari akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan, surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, data yang memuat mengenai kegiatan usaha, antara lain data produksi, data penjualan, data pembelian dan laporan

⁷ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 2002, hal. 116

⁸ Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku 1 (Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Jakarta: Nagaskara, 2001, hal. 34

keuangan, serta surat-surat lainnya.⁹ Pada hukum acara perdata alat bukti surat juga diklasifikasikan menjadi akta otentik, akta dibawah tangan, dan akta sepihak.¹⁰ Perbedaan dari ketiga macam surat itu yaitu dalam kelompok mana suatu tulisan termasuk, itu tergantung dari cara pembuatannya. Akta otentik nilai kekuatan pembuktiannya adalah sempurna dan mengikat. Pengertian dokumen sendiri menurut Undang-undang no. 8 tahun 1997, dokumen perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca dan didengar. Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen keuangan terdiri dari catatan bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan. Untuk dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.¹¹

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999. Petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Perkom No. 1 tahun 2010 adalah pengetahuan Majelis Komisi yang diketahui dan diyakini kebenarannya.

⁹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 tahun 2010, Pasal 73

¹⁰ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet. 7, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hal. 545

¹¹ Binoto Nadapdap, Hukum Acara Persaingan Usaha, Cet.1, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009,hal.9

Petunjuk dapat dijadikan sebagai alat bukti harus di tentukan kasus per kasus. Mengenai alat bukti petunjuk, sebagai perbandingan dapat dikemukakan dalam KUHAP bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, terdakwa. Dalam UU PTUN pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya, dengan demikian hal ini dapat dipersamakan dengan definisi petunjuk yang disebutkan dalam Perkom No.1 tahun 2010. Pada hukum acara perdata, petunjuk ini dapat disamakan dengan persangkaan hakim. Pada dasarnya persangkaan adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Menurut ilmu pengetahuan, persangkaan merupakan bukti tidak langsung dan dibedakan menjadi persangkaan berdasarkan kenyataan dan persangkaan berdasarkan hukum.

e. Keterangan pelaku usaha.

Keterangan terlapor adalah alat bukti terakhir yang disebutkan dalam undang-undang no. 5 tahun 1999. Keterangan terlapor adalah apa yang terlapor nyatakan di depan majelis komisi mengenai perjanjian, perbuatan yang ia lakukan sendiri, ketahui sendiri, atau alami sendiri. Pada Peraturan Komisi No.1 tahun 2010 pasal 72 ayat 4 dikatakan bahwa keterangan terlapor tidak dapat ditarik kembali kecuali ada alasan yang sangat kuat dan dapat diterima oleh majelis komisi¹². Sebagai perbandingan, di dalam hukum acara pidana keterangan terlapor dapat disamakan dengan keterangan

¹² Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.1 Tahun 2010

terdakwa. Keterangan terdakwa ini bersifat bebas dan hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Pada hukum acara peradilan tata usaha negara dijelaskan bahwa pengakuan di muka hakim persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Pengakuan tersebut dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Pengakuan di muka hakim di persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali kalau terbukti bahwa pengakuan itu adalah akibat dari suatu kesesatan atau kekeliruan mengenai hal-hal yang terjadi.

Hukum persaingan usaha memiliki dimensi hukum publik dan hukum perdata. Di banyak kasus persaingan usaha terdapat unsur peristiwa hukum perdata di dalamnya, seperti adanya perjanjian atau kesepakatan di antara para pelaku usaha yang bersaing namun sebenarnya jika dipahami, maka hubungan perdata tersebut adalah bagian dari suatu persekongkolan jahat (seperti kartel) yang merugikan publik (konsumen dalam jumlah besar) atau pelaku usaha lain, sehingga sebenarnya peristiwa perdata tersebut telah masuk ke ranah hukum pidana atau setidaknya suatu tindakan perdata yang merugikan pihak perdata lainnya.

Alat-alat bukti yang digunakan oleh KPPU tersebut sama dengan alat-alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 KUHP, sehingga demikian prinsip pembuktian tentang adanya pelanggaran dalam Undang-Undang No.5 tahun 1999 sama dengan prinsip pembuktian perkara pidana yang berlaku dalam KUHP, yaitu dengan

berpedoman pada pasal 183 KUHAP, yang menentukan bahwa untuk menentukan kesalahan seseorang harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi.

Jika konsisten dengan prinsip pembuktian di atas, maka bukti petunjuk yang tertera dalam pasal 42 Undang-Undang No.5 tahun 1999 yang biasa disamakan sebagai *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung), meskipun dalam hukum persaingan usaha suatu pelanggaran dapat dinyatakan terjadi berdasarkan beberapa alat bukti tidak langsung, tetapi *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) atau petunjuk ini harus berkaitan dan saling mendukung satu sama lain, dan untuk dapat dinyatakan terbukti adanya pelanggaran, jika konsisten dengan prinsip di atas, setidaknya disertai dengan salah satu alat bukti lain, yang ditentukan dalam pasal 42 UU No. 5 tahun 1999 jo. Pasal 72 Peraturan Komisi No. 1 tahun 2010.

B. Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) oleh KPPU

Indirect evidence (alat bukti tidak langsung) adalah alat bukti yang pembuktiannya tidak diajukan secara fisik melainkan diperoleh dengan menyimpulkan, menarik/mengambil dari hal atau suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan.

Indirect evidence adalah alat bukti yang tidak dapat menjelaskan secara terang dan spesifik mengenai materi kesepakatan antara pelaku usaha, seperti :

a) Alat bukti komunikasi yang membuktikan adanya komunikasi dan/atau pertemuan antarpelaku kartel, namun tidak menjelaskan mengenai substansi yang dibicarakan. Contohnya

- rekaman komunikasi antar pesaing, bukti perjalanan menuju satu tempat yang sama dan dalam waktu yang bersamaan antar-pesaing (rapat asosiasi), namun tidak menjelaskan topik yang dibicarakan,.
- notula rapat yang menunjukkan pembicaraan mengenai harga, permintaan, atau kapasitas terpasang.
- dokumen internal yang menjelaskan mengenai strategi harga pesaing.

b) Alat bukti ekonomi. Contohnya

- perilaku pelaku usaha didalam pasar atau industri secara keseluruhan, antara lain harga yang parallel, keuntungan yang tinggi, pangsa pasar yang stabil, catatan pelanggaran hukum persaingan usaha yang pernah dilakukan oleh pelaku usaha.
- bukti perilaku yang memfasilitasi kartel antara lain pertukaran informasi, adanya signal harga, ongkos angkut yang sama, perlindungan harga.

bukti ekonomi structural antara lain tingkat konsentrasi industri yang tinggi, konsentrasi yang rendah pada industry lawannya, tingginya hambatan masuk, banyaknya integrasi vertikal, produk yang homogen.

Dalam beberapa putusan KPPU mengutamakan bukti petunjuk yang masuk dalam kategori bukti yang tidak langsung/ indirect evidence. Berdasarkan pasal 72

ayat (3) peraturan KPPU No.1 tahun 2010 jo. Pasal 2 UU No. 5 tahun 1999, maka KPPU berpendapat bahwa bukti tidak langsung dapat digunakan.

Dalam proses penggunaan alat bukti, KPPU tidak hanya menggunakan alat bukti langsung sebagai satu-satunya jalur dalam menempuh dan jalan masuk untuk mengungkap kegiatan usaha yang melanggar UU No.5 tahun 1999, melainkan juga menggunakan bukti tidak langsung (indirect evidence) berdasarkan pasal di atas.

Alat bukti petunjuk merupakan alat bukti tidak langsung (indirect evidence) yang dapat diterima dalam hukum persaingan usaha. Namun dengan adanya alat bukti tidak langsung ini maka dibutuhkan kecermatan dan kehati-hatian dalam menerapkannya, jangan sampai gosip dan persepsi yang muncul di lapangan tanpa analisis yang mendasar dirangkai sedemikian rupa, kemudian dijadikan sebagai bukti dengan mengatasnamakan alat bukti tidak langsung (indirect evidence). Alat bukti tersebut tetap harus sesuai dengan pasal 2 UU No. 5 tahun 1999, karena bukti tidak langsung ini merupakan bukti petunjuk.

1. Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) dalam Proses Pembuktian menurut Sistem Hukum Pembuktian di Indonesia

Dalam sistem hukum pembuktian hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem menurut undang-undang secara negatif. Teori penggabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian conviction in time, artinya dengan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dapat menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Secara umum di Indonesia terdapat beberapa macam jenis

hukum acara di pengadilan untuk membuktikan suatu perkara di persidangan. Hukum acara yang dimaksudkan adalah hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum persaingan usaha. Secara khusus masing-masing di atur dalam Kitab Hukum Acara Pidana, Kitab Hukum Acara Perdata atau HIR dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha(perkom) Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Diantara penggunaan pembuktian menurut hukum ketiganya tentu terdapat perbedaan-perbedaan. Pembuktian adalah suatu tahapan di dalam hukum untuk meneliti kebenaran atas suatu perkara hukum. Salah satu perbedaannyaterletak pada penggunaan alat bukti tidak langsung (indirect evidence) pada hukum persaingan usaha terhadap hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Untuk hukum acara pidana dalam pasal 1 KUHAP telah di tegaskan “ alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa”. Jadi hukum pembuktian di dalam sistem hukum acara pidana tidak ada pemisahan alat bukti langsung dan tidak langsung.

Sedangkan hukum acara perdata edalam pasal 1 HIR menyebutkan alat bukti yang sah,yaitu: bukti surat; bukti saksi; sangka; pengakuan; sumpah.”pengelompokan bukti langsung dan bukti tidak langsung dalam buku M.Yahya Harahap dijelaskan sebagai berikut.“disebut bukti langsung, karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan”.....”pembuktian yang diajukan tidak bersifat

fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan.”¹³

Secara umum dalam lingkungan fakultas hukum tidak begitu akrab dengan istilah alat bukti langsung (direct evidence) dan alat bukti tidak langsung (indirect evidence). Baik kitab hukum acara pidana atau kitab acara hukum perdata tidak mencantumkan istilah tersebut.

Penggunaan alat bukti tidak langsung (indirect evidence) sebagai alat bukti permulaan seringkali terjadi pembatalan pada putusan KPPU. Secara praktek putusan KPPU dapat dilakukan banding. Apabila terdapat ketidakpuasaan dari para pihak atas putusan KPPU maka banding bisa dilakukan. Dalam jangka 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan, pengajuan keberatan dapat dilakukan kepada pengadilan negeri. “sebagai lembaga negara pembantuan yang sifatnya menjalankan fungsi pemerintahan yang lainnya, yaitu dalam bidang pengawasan persaingan usaha, putusan KPPU dapat dilakukan banding ke Pengadilan Negeri.”¹⁴.

2. Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung) oleh KPPU dalam Membuktikan Adanya Dugaan Kartel

Dalam hal pembuktian praktik kartel, pada Pasal 35 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 yang membahas tentang tugas Komisi Pengawasan Persaingan Usaha sebagai badan independen yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk:

¹³ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 200, Hlm.55

¹⁴ UU No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (KPPU),2012, Hal.25

- a) Melakukan penilaian terhadap perjanjian kartel,
- b) Mengambil tindakan (sesuai Pasal 36 tentang wewenang) yakni : penelitian, penyelidikan dan atau pemeriksaan, memanggil dan menghadirkan pelaku dan saksi, memutuskan dan menetapkan ada tidak adanya kerugian, dan menjatuhkan sanksi administratif.

Kartel dalam pasal 11 Undang-undang No. 5 1999 menetapkan bahwa: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan para pelaku usaha satu dengan pelaku usaha lainnya untuk meniadakan persaingan untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” Jadi kartel pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang dilakukan pelaku usaha satu dengan pelaku usaha yang lainnya untuk meniadakan persaingan diantara mereka. Para pelaku usaha mengatur produksi, distribusi dan harga.

Sedangkan pedoman pelaksanaan pasal 11 tentang kartel merupakan petunjuk pelaksanaan untuk membuktikan dan menentukan unsur-unsur adanya kartel, yang digunakan KPPU untuk membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam kartel berdasarkan Pasal 11 UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan praktik Monopoli dan persaingan tidak sehat sebagai berikut:

- a) Pelaku usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Indonesia, baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha yang terkait dalam kartel biasanya lebih dari dua pelaku usaha, bahkan tidak jarang terjadi dalam asosiasi dagang dengan cara saling melakukan pertukaran informasi di bidang harga, pasokan produk, maupun pembagian wilayah.

b) Perjanjian

Pada dasarnya kartel merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 7 UU No.5 tahun 1999 dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Pembuktian perjanjian tidak tertulis dapat dilakukan melalui bukti kesepakatan yang tertuang dalam agenda rapat dalam bentuk catatan maupun notula. Namun, untuk membuktikan adanya perjanjian tertulis, KPPU sering kali mengalami kesulitan memperoleh data tersebut karena pelaku usaha tidak kooperatif dan menolak memberikan data, selain itu KPPU tidak mempunyai kewenangan untuk menggeledah dan menyita dokumen yang diperlukan sebagai pembuktian.

c) Pelaku usaha pesaingnya

Unsur pelaku usaha pesaingnya adalah pelaku usaha dalam pasar bersangkutan, di mana konsep dan pengertian pasar bersangkutan diatur berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 3 tahun 2009 mengenai pedoman pasal 1 angka 10 tentang pasar bersangkutan.

- d) Bermaksud mempengaruhi harga dan mengatur produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa.

Perilaku para anggota kartel untuk mempengaruhi harga merupakan salah satu unsur penting yang dijadikan indikasi awal adanya kartel. Hal ini mengingat tujuan akhir pembentukan kartel adalah maksimalisasi profit dengan menetapkan harga eksekutif melalui berbagai cara, misalnya membatasi kapasitas produksi dan pasokan barang sehingga harga tetap tertahan di level yang supra kompetitif.

- e) Mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Unsur yang terakhir ini diartikan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha, yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Sementara unsur dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa dengan tidak jujur.

a. Indikator terjadinya kartel

Untuk mengidentifikasi kartel, komisi membuat indikator awal dengan berpedoman pada pasal 11 tentang kartel. Berikut merupakan cara bagi KPPU untuk melakukan upaya menemukan alat bukti dalam indikasi terjadinya kartel melalui metode analisis ekonomi:

1. Faktor struktural

Jika jumlah perusahaan yang tergabung tidak banyak maka kartel akan lebih mudah terjadi. Para pelaku usaha yang tergabung akan lebih mudah untuk melakukan koordinasi dan pengawasan dalam kesepakatan untuk melakukan kartel. biasanya koordinasi kartel dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kuasa atas pasar yang dimainkan dalam kartel, contohnya dalam pasar kelompok minyak goreng. pelaku-pelaku usaha dengan modal yang tinggi dan keunggulan atas penguasaan pasar menjadikan beberapa perusahaan yang memiliki banyak anak perusahaan yang juga bergerak dibidang yang sama memiliki kecenderungan untuk menguasai /mengendalikan pasar.

Produk hasil dari para pelaku usaha sifatnya sejenis. Dengan begitu maka akan dengan mudah melakukan kartel. Pemasaran yang luas akan menyebabkan para pelaku usaha bekerjasama. Kerjasama ini dimungkinkan untuk menguasai pasar dan mengendalikannya demi keuntungan terbesar yang dapat diperoleh oleh pelaku usaha.

2. Faktor perilaku

Kartel dapat dideteksi dengan cara memperhatikan perilaku dari para pelaku usaha yang saling memberikan informasi dan transparansi diantara mereka. dalam kartel tidak diperlukan cara khusus untuk mendapatkan konsumen/pembeli. Karena ketidakhadiran persaingan yang sesungguhnya diantara pelaku usaha menjadikan pelaku usaha merasa aman akan keuntungan dari perusahaan.

Perilaku lainnya yaitu peraturan harga dan kontrak yang patut dicermati oleh KPPU sebagai bagian upaya identifikasi eksistensi kartel. Peraturan mengenai harga

dan kontrak bahwa benar telah dilakukan perjanjian/ kesepakatan oleh para pelaku usaha untuk melakukan penetapan harga, maka harus dilakukan penyelidikan dan pembuktian. Perjanjian dapat melalui alat bukti tertulis (dokumen/ surat) dan tidak tertulis (bukti komunikasi, adanya pertemuan-pertemuan) .

KPPU seringkali menghadapi kesulitan dalam mengungkap dan membuktikan adanya kartel karena perjanjian tersebut dilakukan secara tertutup/diam-diam. Apalagi “ KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan atau penyitaan dokumen terkait kesepakatan tersebut”.¹⁵ Jadi untuk mengetahui kartel yang dilakukan secara diam-diam tersebut akan dilakukan serangkaian kegiatan penelusuran secara metode analisis ekonomi. Variabel-variabel, daftar-daftar harga, kinerja perusahaan, laporan keuangan dan seluruh unsur kegiatan perusahaan akan diselidiki oleh KPPU. Dari data-data tersebut maka akan diketahui apakah ada pelanggaran terhadap UU No. 5 tahun 1999. Jika memang ada pelanggaran, KPPU akan mencari serangkaian alat bukti lainnya. Karena alat bukti tidak langsung (indirect evidence) tidak dapat digunakan sebagai alat bukti satu-satunya. Apabila tidak ada bukti lain yang menyatakan pelanggaran maka KPPU akan memberikan putusan tidak bersalah pada tahap pemeriksaan lanjutan.

¹⁵ Anna Maria Tri Anggraini, Program Leniency dalam Mengungkap Kartel Menurut Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Persaingan, Edisi 6, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Hal.106, <http://www.kppu.go.id/id/wp-content/upload/2012/06/Jurnal-6-2011.pdf>, Diakses pada 21 Februari 2019.

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 menggunakan 2 pendekatan untuk melihat apakah pelaku usaha (perusahaan) diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 atau tidak. Adapun 2 pendekatan tersebut, yakni:

1. Struktur Pasar (“market structure”)

Misalnya bila perusahaan memiliki pangsa pasar lebih dari indikator yang ditetapkan oleh UU yaitu 50% untuk 1 pelaku usaha atau 75% untuk 2 pelaku usaha atau lebih.

2. Perilaku (“behaviour”)

Misalnya melalui tindakan atau perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dengan pelaku usaha pesaingnya atau tidak. Contohnya tindakan jual rugi (“predatory pricing”), perjanjian distributor.

a. Perse Illegal

Maksud pendekatan “perse illegal” adalah bahwa suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum tanpa perlu pembuktian apakah tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan atau tidak. Tindakan tersebut dilarang secara mutlak.

b. Rule of Reason

Maksud pendekatan “rule of reason” adalah bahwa suatu tindakan dapat dinyatakan melanggar hukum apabila tindakan tersebut dapat dibuktikan mempunyai dampak negatif terhadap persaingan.

Metode analisis ekonomi ini ada untuk menganalisis pembuktian kartel dengan menggunakan alat bukti tidak langsung atau *indirect evidence*. Penggunaanya dengan membuktikan adanya hubungan-hubungan antara fakta ekonomi yang satu dengan yang lainnya. Dengan begitu terbukti kartel yang utuh sampai dengan jumlah kerugian yang diderita konsumen. Selain merugikan konsumen secara materil, kartel juga menyebabkan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan tidak kondusif, dan kurang kompetitif dibandingkan dengan negara lain yang menerapkan persaingan usaha yang sehat.

Masalah yang sering muncul adalah dalam hal pembuktian adanya perjanjian kartel diantara para pelaku usaha. Dalam pembuktian kartel, menganut *prinsip rule of reason*. *Prinsip rule of reason* merupakan teori yang melarang kartel dan monopoli hanya dan jika dapat dibuktikan ada efek negatifnya. Praktek kartel baru dianggap bertentangan dengan hukum jika akibatnya dapat merugikan pesaing dan atau konsumen. Titik beratnya adalah unsur material dari perbuatannya.

Penggunaan *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) tidak serta merta diajukan oleh KPPU. Proses penelitian panjang KPPU dilandaskan pada metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kevalidan atau kesahihan analisisnya.

Metode pembuktian praktek kartel dengan menggunakan *indirect evidence* menitik beratkan kepada bagaimana menentukan substitusi dari suatu produk dengan menggunakan :

- 1) Data-data ekonomi

- 2) Market research
- 3) Pendefinisian pasar melalui *directinterview* dengan melakukan wawancara langsung dengan konsumen dan pelaku usaha dan *indirectinterview* dengan *consumer survey* menggunakan kuosioner.

Pembuktian kartel sulit dilakukan jika dihubungkan dengan hukum acara perdata, yang lebih menekankan penggunaan alat bukti langsung (*direct evidence*). Padahal, bukti langsung sangat sulit ditemukan dalam pemeriksaan perkara dugaan praktik kartel, sehingga pembuktian kartel lebih banyak menggunakan *indirect evidence* atau bukti tidak langsung. Dengan *indirect evidence* atau bukti tidak langsung, pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi pembuktian diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan.

Pembuktian jenis *indirect evidence* atau alat bukti tidak langsung ini dapat digunakan sebagai pembuktian terhadap kondisi atau keadaan yang dapat dijadikan dugaan atas pemberlakuan perjanjian lisan. Dengan adanya *indirect evidence* yang diberikan oleh Biro Investigasi KPPU, dapat dianalisis adanya indikasi kartel. Sehingga dengan berbekal potensi kartel ini, Biro Penindakan KPPU dapat menggunakan *indirect evidence* sebagai senjata awal mengungkap kasus kartel. Efeknya, praktik kartel dapat ditindak secara lebih dini, tanpa harus mendapatkan dahulu bukti langsung ataupun laporan dari pelaku usaha pesaing.

Dalam hal *indirect evidence* atau alat bukti tidak langsung yang diungkapkan hanya sedikit tanpa disertai uji ataupun analisis yang tepat, maka tentu saja

pembuktian mengenai pelanggaran kartel menjadi tidak valid. Indirect evidence dapat digunakan, bukan berarti segala pembuktian kartel menggunakan *indirect evidence*. Penggunaan *indirect evidence* adalah sebagai bukti petunjuk, untuk mensinergikan/memberikan keterkaitan antara bukti-bukti utama yang lain yang terdapat pada Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 yakni keterangan saksi, ahli, dan surat atau dokumen.

Oleh karena itu KPPU mendesak amandemen Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, agar dibuatkan pasal tersendiri yang mempertegas dan memperjelas tentang pembuktian *indirect evidence* atau alat bukti tidak langsung dan dengan menerapkan konsep *leniency program*. Konsep *leniency program* adalah keistimewaan bagi pelaku usaha yang terindikasi melakukan kartel. Syaratnya, pelaku usaha tersebut bersedia membuka data dan informasi kepada KPPU mengenai kartel yang dilakukan. Pelaku kartel yang mengaku dan memberikan informasi ke KPPU bisa mendapat insentif atau keringanan hukuman. Dengan adanya konsep ini diharapkan agar KPPU dapat membongkar praktik kartel di Indonesia terutama di Makassar.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang membutuhkan data sekunder sebagai data utama¹. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berupa peraturan perUndang-Undangan yang digunakan dalam penggunaan *Indirect Evidence* Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam proses pembuktian dugaan praktik kartel yaitu UU Nomor 5 Tahun 1999. Kartel belum cukup efektif karna tindakan yang dilakukan KPPU dalam pembuktiannya yang di anggap penting namun belum ada regulasi yang mengaturnya.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam Penelitian ini dilakukan di kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Jl. Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Dengan pertimbangan bahwa kantor ini merupakan wadah dalam mengadili pelanggaran UU No.5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, salah satunya tentang Praktek Kartel.

¹ Ash-Shof, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum yaitu dengan mengkaji tentang teori mengenai proses terjadinya hukum, proses bekerjanya hukum, serta akibat yang timbul di masyarakat.² Karna dalam kedudukan dan penggunaan indirect evidence (alat bukti tidak langsung) dalam proses pembuktian dugaan praktek kartel di kota Makassar.

C. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dari KPPU dan Pengadilan Negeri Makassar.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber kedua (*secunder*) yang terdiri dari:
 - a. Sumber sekunder yang paling diutamakan (primer) yaitu peraturan perundang-undangan, putusan KPPU dan Pengadilan Negeri Makassar serta Mahkamah Agung.
 - b. Sumber sekunder yang diutamakan kedua (sekunder) yaitu literatur hukum yang sifatnya ilmiah dan relevan dengan permasalahan yang dibahas.
 - c. Tersier yaitu sumber sekunder yang diutamakan ketiga yaitu dari sumber yang bersifat melengkapi sumber sekunder yang paling diutamakan dan sumber utama kedua.³

³ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).h.6-8.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pencatatan secara langsung terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.
2. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen dan literatur yang relevan dengan masalah yang penulis teliti.⁴

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis yang digunakan penulis adalah dengan mengumpulkan data kemudian dianalisa secara kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata yang dituang pada penjelasan, uraian, gambaran permasalahan, serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

⁴ Ash-Shof, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkara yang Telah Diputuskan di KPPU

Sejak terbentuknya, KPPU telah menangani sejumlah perkara, baik yang melalui laporan masyarakat, maupun hasil penyelidikan atas inisiatif KPPU sendiri. Dalam kurun waktu tahun 2002 hingga 2016, KPPU pusat telah berhasil menangani sebanyak 348 perkara dari sebanyak 2.573 perkara yang masuk di KPPU. Tahun 2008 yang paling banyak menangani perkara yaitu sebanyak 68 perkara, dan yang terendah pada tahun 2002 yaitu hanya sekitar 8 perkara. Kemudian berturut-turut sejak 2011 sebanyak 13 perkara, 2012 sebanyak 9 perkara, 2013 sebanyak 12 perkara, 2014 sebanyak 19 perkara, 2015 sebanyak 22 perkara, dan 2016 sebanyak 24 perkara. Dari sebanyak 348 perkara yang berhasil diputuskan KPPU Pusat, sebanyak 144 perkara yang lanjut ke proses banding di Pengadilan Negeri. Sebanyak 60 perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan putusan membatalkan putusan KPPU dan 84 putusan Pengadilan Negeri yang menguatkan putusan KPPU. Kemudian dari 144 perkara yang berhasil diputus oleh Pengadilan Negeri, 127 perkara yang lanjut ke proses kasasi ke Mahkamah Agung.¹

Kemudian kondisi penanganan kasus pelanggaran hukum persaingan usaha pada level daerah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perwakilan Daerah

¹Sukarni, Anggota KPPU Pusat, *Penegakan hukum Persaingan Usaha Dalam Angka*, [http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598c0069472ea/](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt598c0069472ea/penegakan-hukum-persaingan-usaha-dalam-rangka) penegakan-hukum-persaingan-usaha-dalam-rangka,(diakses 31 Juli 2019)

Makassar, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2002 hingga 2016 sebanyak 17 perkara dengan sebanyak 13 perkara dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan hanya 3 putusan yang menyatakan tidak terbukti.²

Dari sebanyak 13 perkara yang berhasil diputuskan oleh KPPU Perwakilan Daerah Makassar, hanya 11 perkara yang lanjut ke proses banding ke Pengadilan Negeri Makassar dengan putusan, 1 putusan Pengadilan Negeri Makassar yang menguatkan putusan KPPU Makassar, dan 10 putusan membatalkan putusan KPPU Makassar. Kemudian, dari 11 perkara yang telah diputus Pengadilan Negeri Makassar, semuanya lanjut ke proses kasasi Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung telah berhasil memutus 10 perkara dengan 6 putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan KPPU Makassar dan 4 putusan menguatkan Pengadilan Negeri Makassar.³

B. Penggunaan indirect evidence (alat bukti tidak langsung) oleh KPPU dalam proses pembuktian dugaan praktek kartel (Putusan KPPU No.24/KPPU-I/2009)

a. Identitas para terlapor⁴

1. PT Multimas Nabati Asahan, dengan alamat kantor di B & G Tower, Jl. Putri Hijau No. 10 Medan 20111 sebagai Terlapor I.

²Kantor KPPU Perwakilan Daerah Makassar, Observasi, 2019.

³Kantor KPPU Perwakilan Daerah Makassar, Observasi, 2019.

⁴ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No.24/KPPU-I/2009

2. PT Sinar Alam Permai, dengan alamat kantor di B & G Tower, Jl. Putri Hijau No. 10 Medan 20111 sebagai Terlapor II.
3. PT Wilmar Nabati Indonesia, dengan alamat kantor di Jl. Datuk Laksamana Areal Pelabuhan Dumai- Riau sebagai Terlapor III.
4. PT Multi Nabati Sulawesi, dengan alamat kantor di B & G Tower, Jl. Putri Hijau No. 10 Medan 20111 sebagai Terlapor IV.
5. PT Agrindo Indah Persada, dengan alamat kantor di Jl. Panglima Polim 89 KISARAN 21214 Sumatera Utara sebagai Terlapor V.
6. PT Musim Mas, dengan alamat kantor di Jl. K.L. Yos Sudarso Km 7,8 Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai Terlapor VI.
7. PT Intibenua Perkasatama, dengan alamat kantor di Spring Tower 02- 21, Jl. K.L. Yos Sudarso Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara sebagai Terlapor VII.
8. PT Megasurya Mas, dengan alamat kantor di Jl. Tambak Sawah 32, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur sebagai Terlapor VIII.
9. PT Agro Makmur Raya, dengan alamat kantor di Jl. Soekarno No. 1 Samping Pelabuhan Samudera Bitung – Sulawesi Utara 95521 sebagai Terlapor IX.
10. PT Mikie Oleo Nabati Industri, dengan alamat kantor di Jl. Raya Narogong Km. 9, Bojong Mente Rawa Lumbu Bekasi – 17133 sebagai Terlapor X.
11. PT Indo Karya Internusa, dengan alamat kantor di Spring Tower 03- 33, Jl. K.L. Yos Sudarso Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara 20241 sebagai Terlapor XI.

12. PT Permata Hijau Sawit, dengan alamat kantor di Jl. Iskandar Muda No. 107, Medan 20154 sebagai Terlapor XII.
13. PT Nagamas Palmoil Lestari, dengan alamat kantor di Jl. Iskandar Muda No. 107, Medan 20154 sebagai Terlapor XIII.
14. PT Nubika Jaya, dengan alamat kantor di Jl. Iskandar Muda No. 107, Medan 20154 sebagai Terlapor XIV.
15. PT Smart, Tbk, dengan alamat kantor di BII Plaza Tower II, Lt. 20, Jl. M.H. Thamrin No. 51 Jakarta 10350 sebagai Terlapor XV.
16. PT Salim Ivomas Pratama, dengan alamat kantor di Sudirman Plaza – Indofood Tower Lt. 22 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 sebagai Terlapor XVI.
17. PT Bina Karya Prima, dengan alamat kantor di Focus Bldg. Comp Mitra Sunter Blok B1-B4, Jl. Yos Sudarso Kav. 89, Sunter, Jakarta Utara 14350 sebagai Terlapor XVII.
18. PT Tunas Baru Lampung, Tbk, dengan alamat kantor di Wisma Budi Lt. 9, Jl. H. Rasuna Said Kav. C-6, Jakarta - Selatan sebagai Terlapor XVIII.
19. PT Berlian Eka Sakti Tangguh, dengan alamat kantor di Jl. K. L. Yos Sudarso No. 15, Km. 6, Medan 20116 sebagai Terlapor XIX.
20. PT Pacific Palmindo Industri, dengan alamat kantor di Jl. Pulau Bawean Kawasan Industri Medan II, Mabar, Medan 20242 sebagai Terlapor XX.
21. PT Asian Agro Agung Jaya, dengan alamat kantor di Jl. Semarang Blok A-6/1, KBN Marunda Cilincing, Jakarta Utara 14150 sebagai Terlapor XXI.

b. Duduk perkara⁵

1. Sekretariat Komisi telah melakukan monitoring terhadap pelaku usaha di bidang industri minyak goreng dan berdasarkan hasil rapat komisi tanggal 15 September 2009 diputuskan perlu ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan.
2. Setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup adanya dugaan pelanggaran Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 sehingga Tim Pemeriksa merekomendasikan untuk dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.
3. Dalam proses Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi serta instansi pemerintah.
4. Setelah Majelis Komisi mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan kemudian melakukan penilaian bahwa industri minyak goreng merupakan industri yang memiliki nilai strategis karena berfungsi sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Perkembangan industri minyak goreng di Indonesia telah menempatkan minyak goreng dengan bahan baku kelapa sawit sebagai komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat saat ini. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya ketersediaan bahan baku lain selain kelapa sawit.
5. Selain itu, karakteristik kelapa sawit yang memiliki berbagai macam produk turunan juga telah berkembang, industri-industri yang terkait dengan kelapa sawit dan turunannya termasuk diantaranya adalah industri minyak goreng sawit

⁵ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No.24/KPPU-I/2009

(selanjutnya disebut "Minyak Goreng"). Namun demikian, struktur pasar industri minyak goreng yang oligopoli telah mendorong perilaku beberapa pelaku usaha produsen minyak goreng untuk menentukan harga sehingga pergerakan harganya tidak responsif dengan pergerakan harga CPO padahal CPO merupakan bahan baku utama dari minyak goreng. Hal tersebut tercermin dari periode waktu tahun 2007 hingga tahun 2009. Atas dasar hal tersebut, Tim Pemeriksa menduga adanya indikasi pelanggaran Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999.

c. Pertimbangan Hukum Majelis Komisi KPPU⁶

Bahwa karena Terlapor diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 dan Pasal 5 dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999, maka hanya ketiga Pasal tersebut juga yang dianalisis dan ditimbang oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana secara berurutan berikut.

a) Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Untuk menyatakan terbukti melakukan Pasal 4 UU No. 1999 tersebut, maka Majelis KPPU menimbang unsur-unsur Pasal 4 tersebut sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha⁷

⁶ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No.24/KPPU-I/2009

Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pelanggaran ketentuan Pasal ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XV, Terlapor XIX, dan Terlapor XXI untuk pasar minyak goreng curah. Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor XV, Terlapor XVI, dan Terlapor XVII untuk pasar minyak goreng kemasan sebagaimana dinyatakan dalam butir 1.1 Bagian Tentang Hukum.

Bahwa pada prakteknya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XV, XVI, XIX, dan XXI melakukan kegiatan produksi dan penjualan minyak goreng curah. Terlapor I, II, IV, XV, XVI, dan XVII melakukan kegiatan produksi dan penjualan minyak goreng kemasan (bermerek) dengan demikian, unsur pelaku usaha **terpenuhi**.

2. Perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa.⁸

⁷Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 24/KPPU-I/2009

⁸Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 24/KPPU-I/2009

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, dimungkinkan adanya fakta perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis. perilaku yang terurai dalam uraian indirect evidence sebagaimana butir 2 Bagian Tentang Hukum dapat dikategorikan sebagai perjanjian tidak tertulis yang bertujuan untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran minyak goreng di Indonesia.

Bahwa penguasaan produksi pada pasar minyak goreng curah ditunjukkan dengan penguasaan pasar oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XIX, dan Terlapor XXI.

Bahwa penguasaan produksi pada pasar minyak goreng kemasan (bermerek) ditunjukkan dengan penguasaan pasar oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor XV, Terlapor XVI, dan Terlapor XVII. Bahwa apabila mempertimbangkan jangka waktu perilaku price parallelism yang terjadi hingga bulan Agustus 2009, maka Majelis Komisi menilai bahwa para Terlapor tersebut secara tidak langsung masih mengikatkan diri dalam perjanjian guna mempertahankan penguasaan dan konsentrasi pasarnya. Bahwa dengan demikian unsur perjanjian dengan pelaku usaha

lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa **terpenuhi**.

3. Unsur Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁹

Bahwa yang dimaksud dengan praktek monopoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Bahwa perilaku para Terlapor tersebut yang melakukan kesepakatan tidak langsung guna menguasai dan mempertahankan penguasaan dan konsentrasinya di pasar minyak goreng di Indonesia dapat dikategorikan sebagai tindakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh beberapa Terlapor tersebut.

Bahwa selanjutnya, Majelis Komisi menilai adanya dampak kerugian konsumen yang dapat dikategorikan sebagai dampak yang merugikan kepentingan umum terlebih lagi mempertimbangkan produk minyak goreng merupakan salah satu produk kebutuhan pokok masyarakat.

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau

⁹Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 24/KPPU-I/2009

pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Bahwa perilaku para Terlapor dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak jujur dan/atau menghambat persaingan usaha. Bahwa dengan demikian, unsur praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**.

b) Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:

- (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
 - b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha¹⁰

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pelanggaran ketentuan Pasal ini adalah Terlapor I sampai dengan Terlapor XXI namun tidak termasuk Terlapor XIII. Bahwa dalam prakteknya, para Terlapor tersebut melakukan kegiatan produksi dan/atau penjualan minyak goreng curah dan/atau kemasan (bermerek)

¹⁰ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 24/KPPU-I/2009

sehingga secara mutatis mutandis menjadi bagian dari pertimbangan hukum ini. Bahwa oleh karena itu, unsur pelaku usaha **terpenuhi**.

2. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.¹¹

Bahwa definisi dan bentuk perjanjian telah diuraikan. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir – butir mengenai indirect evidence, pembuktian adanya kartel termasuk diantaranya kartel harga dapat menggunakan bukti komunikasi dan bukti ekonomi sebagai bukti tidak langsung.

Bahwa berkaitan dengan bukti komunikasi, Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta adanya pertemuan dan/atau komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh para Terlapor pada tanggal 29 Februari 2008 dan tanggal 9 Februari 2009. Bahkan dalam pertemuan dan/atau komunikasi tersebut dibahas antara lain mengenai harga, kapasitas produksi, dan struktur biaya produksi. Bahwa berkaitan dengan bukti ekonomi, Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta-fakta terkait dengan struktur dan perilaku dimana secara struktur pasar merupakan oligopoli yang semakin terkonsentrasi dan perilaku para Terlapor yang dapat dikategorikan sebagai price parallelism dan facilitating practices yang dilakukan melalui price.

Bahwa atas dasar indirect evidence tersebut, Majelis Komisi berpendapat telah terjadi komunikasi dan/atau koordinasi di antara para Terlapor yang

¹¹Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 24/KPPU-I/2009

mengakibatkan terjadinya price parallelism. Bahwa price parallelism tersebut ditetapkan oleh para Terlapor kepada pembeli atau pelanggan para Terlapor selaku konsumen antara produk minyak goreng. Bahwa atas dasar uraian tersebut, Majelis Komisi menilai komunikasi dan/atau koordinasi dengan didukung bukti ekonomi tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh antar pelaku usaha yang bersaing dalam hal ini para Terlapor untuk menetapkan harga minyak goreng yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Bahwa dengan demikian, unsur Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama **terpenuhi.**

- c) Menimbang bahwa Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha¹²

Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pelanggaran ketentuan Pasal ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor X, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan Terlapor XXI. Bahwa dalam prakteknya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor X, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan Terlapor XXI melakukan kegiatan produksi dan/atau pemasaran minyak goreng kemasan (bermerek). Bahwa oleh karena itu, unsur pelaku usaha **terpenuhi**.

2. Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.¹³

Bahwa definisi dan bentuk serta pembuktian adanya perjanjian telah diuraikan. Bahwa dalam perkara ini, Majelis Komisi menemukan adanya bukti pengaturan dalam pemasaran produk minyak goreng kemasan (bermerek) yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor X, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan Terlapor XXI melalui perilaku *facilitating practice* dalam kegiatan pemasaran sebagaimana telah diuraikan pada butir-butir mengenai *indirect evidence*. Bahwa atas dasar tersebut, Majelis Komisi menilai perilaku pemasaran yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor X, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan Terlapor XXI

¹²Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 24/KPPU-I/2009

¹³Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 24/KPPU-I/2009

tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur pemasaran minyak goreng kemasan (bermerek). Bahwa dengan demikian, unsur perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa **terpenuhi**.

3. Unsur Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat¹⁴

Bahwa yang dimaksud dengan praktek monopoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Bahwa dampak perilaku pemasaran yang dilakukan para Terlapor mengakibatkan tidak adanya persaingan dari sisi harga dan terbukti mengakibatkan kerugian konsumen sebagaimana telah diuraikan pada butir 3 Bagian Tentang Hukum. Kerugian konsumen tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian kepentingan umum mengingat produk minyak goreng merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan strategis masyarakat.

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau

¹⁴Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No. 24/KPPU-I/2009

pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Bahwa perilaku para Terlapor dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak jujur dan/atau menghambat persaingan usaha. Bahwa dengan demikian, unsur praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**.

d. Diktum/Amar Putusan KPPU No. 24/KPPU-I/2009

Setelah Majelis KPPU menimbang Pasal-Pasal UU No. 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diduga dilanggar oleh Terlapor sebagaimana dalam perkara tersebut, maka Majelis KPPU menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I: PT Multimas Nabati Asahan, Terlapor II: PT Sinar Alam Permai, Terlapor III: PT Wilmar Nabati Indonesia, Terlapor IV: PT Multi Nabati Sulawesi, Terlapor V: PT Agrindo Indah Persada, Terlapor VI: PT Musim Mas, Terlapor VII: PT Intibenua Perkasatama, Terlapor VIII: PT Megasurya Mas, Terlapor IX: PT Agro Makmur Raya, Terlapor X: PT Mikie Oleo Nabati Industri, Terlapor XI: PT Indo Karya Internusa, Terlapor XV: PT Smart, Tbk, Terlapor XIX: PT Berlian Eka Sakti Tangguh, dan Terlapor XXI: PT Asian Agro Agung Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng curah.
2. Menyatakan Terlapor I: PT Multimas Nabati Asahan, Terlapor II: PT Sinar Alam Permai, Terlapor IV: PT Multi Nabati Sulawesi, Terlapor XV: PT Smart, Tbk, Terlapor XVI: PT Salim Ivomas Pratama, dan Terlapor XVII: PT Bina Karya

Prima terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng kemasan (bermerek).

3. Menyatakan Terlapor XII: PT Permata Hijau Sawit, Terlapor XIII: PT Nagamas Palmoil Lestari, Terlapor XIV: PT Nubika Jaya, Terlapor XVIII: PT Tunas Baru Lampung, Tbk, dan Terlapor XX: PT Pacific Palmindo Industri tidak terbukti melanggar Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasar minyak goreng curah.
4. Menyatakan Terlapor X: PT Mikie Oleo Nabati Industri, Terlapor XVIII: PT Tunas Baru Lampung, Tbk, dan Terlapor XXI: PT Asian Agro Agung Jaya tidak terbukti melanggar Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasar minyak goreng kemasan (bermerek).
5. Menyatakan Terlapor I: PT Multimas Nabati Asahan, Terlapor II: PT Sinar Alam Permai, Terlapor III: PT Wilmar Nabati Indonesia, Terlapor IV: PT Multi Nabati Sulawesi, Terlapor V: PT Agrindo Indah Persada, Terlapor VI: PT Musim Mas, Terlapor VII: PT Intibenua Perkasatama, Terlapor VIII: PT Megasurya Mas, Terlapor IX: PT Agro Makmur Raya, Terlapor X: PT Mikie Oleo Nabati Industri, Terlapor XI: PT Indo Karya Internusa, Terlapor XII: PT Permata Hijau Sawit, Terlapor XIV: PT Nubika Jaya, Terlapor XV: PT Smart, Tbk, Terlapor XVIII: PT Tunas Baru Lampung, Tbk, Terlapor XIX: PT Berlian Eka Sakti Tangguh, Terlapor XX: PT Pacific Palmindo Industri dan Terlapor XXI: PT Asian Agro Agung Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng curah.

6. Menyatakan Terlapor I: PT Multimas Nabati Asahan, Terlapor II: PT Sinar Alam Permai, Terlapor IV: PT Multi Nabati Sulawesi, Terlapor X: PT Mikie Oleo Nabati Industri, Terlapor XV: PT Smart, Tbk, Terlapor XVI: PT Salim Ivomas Pratama, dan Terlapor XVII: PT Bina Karya Prima, Terlapor XVIII: PT Tunas Baru Lampung, Tbk dan Terlapor XXI: PT Asian Agro Agung Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng kemasan (bermerek).
7. Menyatakan Terlapor XIII: PT Nagamas Palmoil Lestari tidak terbukti melanggar Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng curah.
8. Menyatakan Terlapor I: PT Multimas Nabati Asahan, Terlapor II: PT Sinar Alam Permai, Terlapor IV: PT Multi Nabati Sulawesi, Terlapor X: PT Mikie Oleo Nabati Industri, Terlapor XV: PT Smart, Tbk, Terlapor XVI: PT Salim Ivomas Pratama, dan Terlapor XVII: PT Bina Karya Prima, Terlapor XVIII: PT Tunas Baru Lampung, Tbk dan Terlapor XXI: PT Asian Agro Agung Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng kemasan (bermerek).
9. Menyatakan Terlapor I: PT Multimas Nabati Asahan, Terlapor II: PT Sinar Alam Permai, Terlapor III: PT Wilmar Nabati Indonesia, Terlapor IV: PT Multi Nabati Sulawesi, Terlapor V: PT Agrindo Indah Persada, Terlapor VI: PT Musim Mas, Terlapor VII: PT Intibenua Perkasatama, Terlapor VIII: PT Megasurya Mas, Terlapor IX: PT Agro Makmur Raya, Terlapor X: PT Mikie Oleo Nabati Industri, Terlapor XI: PT Indo Karya Internusa, Terlapor XII: PT Permata Hijau Sawit,

Terlapor XIII: PT Nagamas Palmoil Lestari, Terlapor XIV: PT Nubika Jaya, Terlapor XV: PT Smart, Tbk, Terlapor XVIII: PT Tunas Baru Lampung, Tbk, Terlapor XIX: PT Berlian Eka Sakti Tangguh, Terlapor XX: PT Pacific Palmindo Industri dan Terlapor XXI: PT Asian Agro Agung Jaya tidak terbukti melanggar Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk pasar minyak goreng curah.

10. Menghukum Terlapor I: PT Multimas Nabati Asahan untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
11. Menghukum Terlapor II: PT Sinar Alam Permai untuk membayar denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
12. Menghukum Terlapor III: PT Wilmar Nabati Indonesia untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank

Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

13. Menghukum Terlapor IV: PT Multi Nabati Sulawesi untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
14. Menghukum Terlapor V: PT Agrindo Indah Persada untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
15. Menghukum Terlapor VI: PT Musim Mas untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
16. Menghukum Terlapor VII: PT Intibenua Perkasatama untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas

Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

17. Menghukum Terlapor VIII: PT Megasurya Mas untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
18. Terlapor IX: PT Agro Makmur Raya untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
19. Menghukum Terlapor X: PT Mikie Oleo Nabati Industri untuk membayar denda sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

20. Menghukum Terlapor XI: PT Indo Karya Internusa untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
21. Menghukum Terlapor XII: PT Permata Hijau Sawit untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
22. Menghukum Terlapor XIV: PT Nubika Jaya untuk membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha 71 SALINAN Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
23. Menghukum Terlapor XV: PT Smart, Tbk untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank

Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

24. Menghukum Terlapor XVI: PT Salim Ivomas Pratama untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
25. Terlapor XVII: PT Bina Karya Prima untuk membayar denda sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
26. Menghukum Terlapor XVIII: PT Tunas Baru Lampung, Tbk untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
27. Menghukum Terlapor XIX: PT Berlian Eka Sakti Tangguh untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus

disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

28. Menghukum Terlapor XX: PT Pacific Palmindo Industri untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

29. Menghukum Terlapor XXI: PT Asian Agro Agung Jaya untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di bidang Persaingan Usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan Kode Penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Bahwa putusan Majelis Komisi pada point pertama tersebut, menurut penulis sudah relevan karena unsur-unsur dalam pasal 4 UU Nomor 5 tahun 1999 terpenuhi. Pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan pendekatan *rule of reason* yaitu bahwa suatu tindakan dapat dinyatakan melanggar hukum apabila tindakan tersebut dapat dibuktikan mempunyai dampak negatif terhadap persaingan. Dalam kasus ini Struktur pasar industri minyak goreng bersifat oligopoli dan para terlapor

menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang yaitu minyak goreng. Hal ini dapat dilihat dari tingkat konsentrasi pasar dimana struktur pasar minyak goreng curah di Indonesia sangat terkonsentrasi, Musim Mas Group dan Wilmar Group merupakan perusahaan dengan pangsa pasar terbesar di pasar minyak goreng curah. Selanjutnya diikuti oleh PT Smart, Tbk, dan Permata Hijau Group.

Bahwa putusan Majelis Komisi pada Point kedua, menurut penulis relevan karena unsur-unsur dalam pasal 4 UU Nomor 5 tahun 1999 juga terpenuhi. Dimana Struktur pasar minyak goreng kemasan di Indonesia sangat terkonsentrasi. PT Salim Ivomas, Wilmar Group, PT Smart, Tbk dan PT Bina Karya Prima merupakan perusahaan dengan pangsa pasar terbesar di pasar minyak goreng kemasan.

Bahwa putusan Majelis Komisi pada Point ketiga, menurut penulis relevan karena para terlapor tersebut memang tidak memiliki faktor-faktor yang dapat menyebabkan adanya kartel. Ini dapat dilihat dari struktur pasar yang tidak terkonsentrasi atau tidak menguasai 75% pangsa pasar minyak goreng curah.

Begitupun putusan Majelis Komisi pada point keempat, menurut penulis sudah relevan karena memang pangsa pasar yang dikuasai tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 4 UU Nomor 5 tahun 1999.

Bahwa putusan Majelis Komisi pada point kelima, menurut penulis sangat relevan karena indikasi awal diduga telah terjadi pelanggaran pasal 5 UU Nomor 5 tahun 1999 adalah dengan adanya bukti komunikasi berupa pertemuan para terlapor pada tanggal 29 Februari 2008 dan tanggal 9 Februari 2009, yang menyatakan adanya

price parallelism. Kemudian didukung oleh bukti ekonomi yang berkaitan dengan struktur pasar yang bersifat oligopoli untuk pasar minyak goreng curah.

Bahwa pada point keenam, menurut penulis tetap relevan karena pertimbangan majelis komisi sama dengan point kelima.

Bahwa putusan Majelis Komisi pada point ke tujuh yang membebaskan terlapor XIII adalah benar karena terlapor tiga hanya memproduksi minyak goreng yang penjualannya di luar geografis di Indonesia atau untuk ekspor.

Bahwa putusan Majelis Komisi pada point ke delapan, menurut penulis juga relevan karena memenuhi unsur-unsur dalam pasal 11 UU No.5 tahun 1999. Kartel yang terjadi di Indonesia menggunakan pendekatan *rule of reason*, menurut penulis harusnya kartel itu menggunakan pendekatan *per se illegal* yang mana tanpa adanya pembuktian dampak dari perjanjian tersebut sudah dinyatakan melanggar. Dalam kasus ini yang menjadi pertimbangan majelis komisi adalah *Facilitating practices* yang dilakukan melalui *price signaling* dalam kegiatan promosi dalam waktu yang tidak bersamaan serta pertemuan- pertemuan atau komunikasi antar pesaing melalui asosiasi untuk pasar minyak goreng kemasan.

Bahwa putusan Majelis Komisi pada point ke sembilan, menurut penulis juga relevan karena dasar pertimbangannya sama dengan point kedelapan.

Bahwa putusan majelis Komisi pada point selanjutnya sampai terakhir, menurut penulis tidak relevan. Dimana majelis hakim menjatuhkan besarnya denda sangat sedikit sehingga sangat mudah untuk dipenuhi para terlapor, mengingat

keuntungan yang mereka dapatkan sangat banyak. Sehingga bisa saja tidak memberikan efek jera dan tidak membuat para terlapor mengubah perilaku mereka.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut hemat penulis putusan yang menyatakan bahwa benar telah terbukti adanya pelanggaran pasal 4, pasal 5 dan pasal 11 UU Nomor 5 tahun 1999 yaitu masing-masing tentang praktek oligopoli, penetapan harga, dan kartel oleh Majelis Komisi dengan menggunakan indirect evidence untuk membuktikannya **dapat diterima**, dengan syarat bahwa bukti komunikasi dan bukti ekonomi tersebut berkesesuaian dengan alat bukti yang sah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Membahas tentang alat bukti minimal yang harus dipenuhi Majelis Komisi, di dalam perkom No.1 tahun 2006 menyatakan bahwa Majelis Komisi menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dan menentukan nilai pembuktian berdasarkan kesesuaian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah. Namun perkom No.1 tahun 2006 ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan kemudian digantikan oleh Perkom No.1 tahun 2010. Di pasal 72 Perkom No.1 tahun 2010 ayat 2 menyatakan bahwa Majelis Komisi menentukan sah atau tidaknya suatu alat bukti. Mengenai hal tersebut tidak ada penjelasan lebih jelas tentang minimal alat bukti yang harus dipenuhi. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang ada pada pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya.

Menurut penulis sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa Majelis Komisi dalam menjatuhkan putusannya sebaiknya berdasarkan minimal alat bukti untuk menjatuhkan suatu putusan karena apabila dilakukan upaya hukum keberatan oleh pelaku usaha, menurut pendapat penulis kemungkinan besar akan dibatalkan oleh Pengadilan Negeri karena kurangnya bukti minimal tersebut.

B. Kekuatan hukum pembuktian indirect evidence (alat bukti tidak langsung) yang digunakan oleh KPPU

Indirect evidence (alat bukti tidak langsung) yang digunakan oleh KPPU masih menuai perdebatan dalam hukum persaingan usaha, khususnya terkait dengan kasus kartel. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju dengan penggunaan jenis pembuktian *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) ini. KPPU termasuk pihak yang setuju dalam penggunaan *Indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) ini.

Perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sering berlanjut pada upaya keberatan dan kasasi karena banyak pelaku usaha yang tidak menerima *indirect evidence* atau alat bukti tidak langsung yang digunakan oleh KPPU dalam memutus perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, secara khusus perkara kartel. Penggunaan *indirect evidence* atau alat bukti tidak langsung hingga saat ini menjadi perdebatan dikalangan akademisi, praktisi hukum dan penegak hukum. Perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap penggunaan *indirect evidence* atau alat bukti tidak langsung juga terjadi diantara para hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada Mahkamah Agung. Hal ini terbukti, dengan adanya putusan KPPU yang dikuatkan dan dibatalkan oleh pengadilan negeri dan mahkamah agung.

Permasalahan yang terjadi seputar penggunaan alat bukti ini adalah dalam hal penggunaan *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) atau petunjuk. Di dalam beberapa putusan terungkap bahwa KPPU mengedepankan bukti petunjuk yang termasuk kategori *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung).

Menurut kepala bidang penegakan hukum KPPU kantor wilayah Makassar, Hardianto bahwa ¹⁵“hukum persaingan itu adalah hal baru, karena hukum persaingan itu tidak termasuk dalam tatanan hukum hirarki peraturan perundang-undangan dalam proses tata cara di pengadilan. Jika di katakana sejauh mana kekuatan hukum pembuktian *Indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) dalam KPPU itu sama dengan kekuatan hukum pembuktian yang lainnya. *Indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) dijadikan sebagai petunjuk untuk mendapatkan bukti lainnya dan *Indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) belum tentu adalah alat bukti petunjuk tapi bisa jadi alat bukti petunjuk jika memiliki korelasi dengan persengketaan yang sedang dihadapi. Sampai saat ini memang belum ada aturannya, aturan secara KUHPnya belum ada. Tapi di KPPU *Indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) sudah diatur dalam Perkom No.1 Tahun 2019 pada pasal 57 yang menyatakan :¹⁶

- (1) Petunjuk merupakan perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan menurut ketentuan Undang-Undang, menandakan bahwa telah terjadi

¹⁵ Hardianto, Kepala Bagian Penegakan Hukum KPPU Wilayah Makassar.

¹⁶ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

suatu perjanjian dan/atau kegiatan yang dilarang dan/atau penyalahgunaan posisi dominan dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bukti ekonomi dan/atau bukti komunikasi yang oleh Majelis Komisi diyakini kebenarannya.

(3) Bukti ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penggunaan dalil-dalil ilmu ekonomi yang ditunjang oleh metode analisis data kuantitatif dan/atau kualitatif serta hasil analisis Ahli, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

(4) Bukti komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemanfaatan data dan/atau dokumen yang menunjukkan adanya tukar menukar informasi antar pihak yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Menurut penulis petunjuk atau *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) dapat dijadikan sebagai alat bukti asalkan petunjuk itu mempunyai kesesuaian dengan alat bukti lainnya, atau sesuai dengan perbuatan atau perjanjian yang diduga melanggar undang-undang persaingan usaha. Sesuatu petunjuk yang didapat dalam bentuk tertulis, kekuatan pembuktiannya dikategorikan sama dengan kekuatan pembuktian surat atau dokumen. Penggunaan alat bukti dalam perkara monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tidak dapat disamaratakan, tetapi ditentukan kasus per kasus. Dan *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) agaknya dijadikan dasar oleh KPPU, disebabkan karena pembuktian dengan menggunakan perjanjian atau kesepakatan tertulis sangat sulit dilakukan. Ketiadaan wewenang KPPU untuk melakukan penggeledahan dan menyita surat-surat dan dokumen perusahaan menjadi salah satu penyebab sulitnya pembuktian. Selain itu, keberadaan KPPU sebagai lembaga persaingan usaha telah menjadi faktor yang diperhitungkan oleh pelaku usaha. Karena ketiadaan wewenang untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan surat-surat dan dokumen perusahaan dalam rangka pencarian alat bukti langsung dan sulitnya

pembuktian di dalam perkara-perkara persaingan usaha, maka dapat dianggap bahwa hukum persaingan usaha ini memiliki ciri khas sendiri dalam proses pembuktiannya. Oleh karena itu, pengaturan tentang system pembuktian di KPPU dengan di pengadilan harus mengikuti sifat dan ciri khas tersendiri dalam pembuktian dalam penyelesaian kasus-kasus persaingan usaha.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) belum memiliki kekuatan yang jelas dan tegas dalam Perundang-undangan di Indonesia. Inilah yang menjadi penyebab seringnya pembatalan dan penolakan putusan KPPU di pengadilan negeri dan mahkamah agung, dengan alasan KPPU menggunakan *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) sebagai satu-satunya bukti utama dalam proses pembuktian untuk menjerat pelaku kartel.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan *indirect evidence* dalam *Putusan KPPU No.24/KPPU-I/2009* yang menyatakan bahwa benar telah terbukti adanya pelanggaran pasal 4, pasal 5 dan pasal 11 UU Nomor 5 tahun 1999 yaitu masing-masing tentang praktek oligopoli, penetapan harga, dan kartel oleh Majelis Komisi dengan menggunakan *indirect evidence* untuk membuktikannya **dapat diterima**, dengan syarat bahwa bukti komunikasi dan bukti ekonomi tersebut berkesesuaian dengan alat bukti yang sah yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

2. Kekuatan hukum pembuktian *indirect evidence* di KPPU sama dengan kekuatan hukum pembuktian yang lainnya yang telah di atur dalam pasal 42 UU Nomor 5 Tahun 1999. Dan telah diatur dalam Pasal 57 Perkom Nomor 1 Tahun 2019.

B. Saran

1. Penggunaan *indirect evidence* (alat bukti tidak langsung) oleh KPPU perlu kecermatan dan kehati-hatian dalam menerapkannya. Jangan sampai gosip dan persepsi yang muncul di lapangan tanpa analisis yang mendasar dirangkai sedemikian rupa, lalu dijadikan sebagai alat bukti dengan mengatasnamakan *indirect evidence* atau alat bukti tidak langsung.

2. Kekuatan pembuktian *indirect evidence* atau alat bukti tidak langsung oleh KPPU masih lemah, sehingga peneliti menyarankan kepada KPPU agar mengamandemen Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang larangan praktek

monopoli dan persaingan tidak sehat dengan memasukkan pasal tentang *indirect evidence* atau alat bukti tidak langsung.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Ash-Shof, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Asnawi, M. Natsir. 2013. *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta.

Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasan, Burhanuddin dan Harianto Sugiono. *Hukum Acara dan Praktik Peradilan Perdata*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Isnaeni, Moch. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Surabaya: Laros, 2008.

Jusmadi, Ridho. *Konsep Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Setara Press, 2014.

Kagramanto, Budi. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan UU No 5 Tahun 1999*. Surabaya: Laros, 2008.

Margono, Suyud. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Marilang. *Hukum Perikatan*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

R. Saliman, Abdul. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Rokan, Mustafa Kamal. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sadi, Muhammad. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Malang: Setara Press, 2016.

Sinaga, Harjono, Destivano Wibowo. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1984.

Usman, Rachmadi. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Yani, Ahmad, dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Wibowo, Destivano dan Harjon Sinaga. 2005. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: PT. Arya WD.

Widjaja, Gunawan, ***Rahasia Dagang***. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001. Citra Aditya Bakti Bandung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 tahun 2010 tentang Kartel.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

C. Sumber lainnya

Anggraini, Anna Maria Tri.2011. “Program Linieny dalam Mengungkap Kartel Menurut Hukum Persaingan Usaha” dalam jurnal persaingan usaha.Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Marilang, S.H. Pembuktian Perjanjian dalam Praktek Monopoli. Indonesia Prime, 2019.

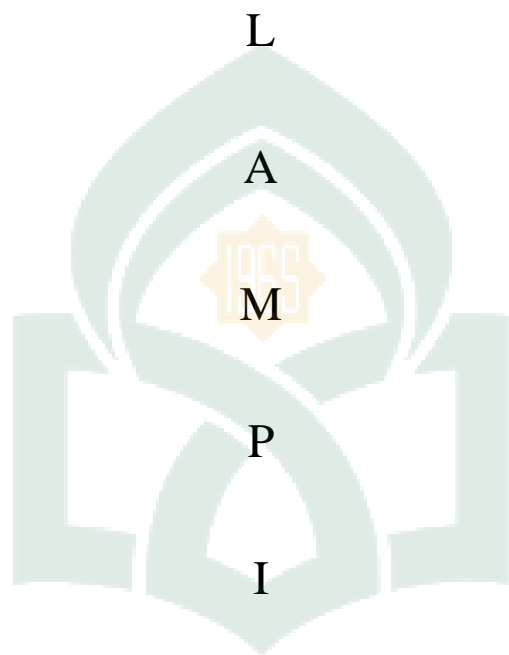
Munadiyah, Riris. 2011. “Alat Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha”.

Nurjannah, St. "Penguasaan Produksi Melalui Integrasi Vertikal (Ditinjau dari UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)", Al:Daulah: *Jurnal Ilmu Hukum* 4:1 (2017)

<https://www.temukanpengertian.com/2013/09/pengertian-persaingan.html>,18 Desember 2018.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_\(fisika\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Usaha_(fisika)) ,18 Desember 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pengawas_Persaingan_Usaha, 18 Desember 2018



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

N






PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Pembimbing dan penguji penyusunan skripsi saudara NURAENI, NIM 10400115020. Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan Judul "Penggunaan Indirect Evidence Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel (Studi Putusan No. 24/KPPU-I/2009)", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk sidang hasil.

Demikian persetujuan diberikan untuk proses lebih lanjut.

Gowa, Agustus 2019

Pembimbing I



Erlina, S.H., M.H.
NIP: 19691219 200501 2 003

Pembimbing II



Ashar Sinilele, S.H., M.H.
NIP: 19690717 201411 1 001

Penguji I




Dr. Fadli A. Natsif, S.H., M.H.
NIP: 19661016 201411 1 001

Penguji II



St. Nurjannah, S.H., M.H.
NIP: 19760822 200312 2 003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Istiqamah, S.H., M.H.
NIP: 196801120 199503 2 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN PENGUJI

Pembimbing dan penguji penyusunan skripsi saudara NURAENI, NIM 10400115020. Mahasiswa jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan Judul "Penggunaan Indirect Evidence Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel (Studi Putusan No. 24/KPPU-I/2009)", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk sidang *Munagasyah*.

Demikian persetujuan diberikan untuk proses lebih lanjut.

Gowa, Agustus 2019

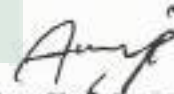
Pembimbing I



Ertina, S.H., M.H.

NIP: 19691219 200501 2 003

Pembimbing II



Ashar Similele, S.H., M.H.

NIP: 19690717 201411 1 001

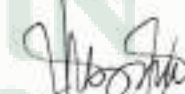
Penguji I



Dr. Fadli A. Natsif, S.H., M.H.

NIP: 19661016 201411 1 001

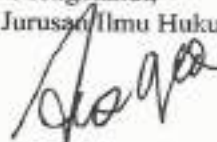
Penguji II



St. Nurjannah, S.H., M.H.

NIP: 19760822/200312 2 003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Istiqamah, S.H., M.H.

NIP: 196801120 199503 2 001

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor 1902 Tahun 2019
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI TAHUN 2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

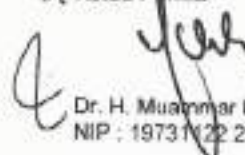
- Membaca** :
- Surat Permohonan : :
 - Nama : Nuraeni
 - N I M : 10400115020
 - Jurusan : Ilmu Hukum
 - Hari/Tanggal : Selasa 20 Agustus 2019
 - Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
 - Judul : "Penggunaan Indirect Evidence Oleh KPPU dlm Proses Pembuktian dengan Praktek Kartel."
- Menimbang** :
- a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
 - b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
 - c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
 - 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut
- Ketua : Dr. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.
 - Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H.
 - Penguji I : Dr. Fadli Andi Natsif, S.H., M.H.
 - Penguji II : St. Nurjannah, S.H., M.H.
 - Pelaksana : Nurhayati Wahid
- Kedua** :
- Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Munaqasyah/Skripsi
- Ketiga** :
- Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibeban kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019;
- Keempat** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Romang Polong, 19 Agustus 2019
Ketua Panitia



Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc. M.Ag.
NIP : 19731122 200012 1 002

Tembusan :

- Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 1815 Tahun 2019

TENTANG

PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI
TAHUN 2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan
Nama : Nuraeni
NIM : 10400115020
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Selasa, 13 Agustus 2019
Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Penggunaan Indirect Evidence Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel (Studi Putusan No. 24/KPPU-I/2009)"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

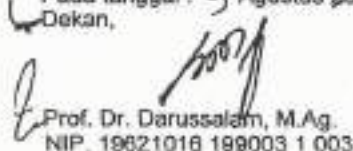
Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Sekretaris : Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.
Penguji I : Dr. Fadli Andi Natsif, M.H.
Penguji II : ST. Nurjannah, S.H., M.H.
Pelaksana : 1. Basyirah Mustarin, S.H., M.H.
2. Herawati, S.H.

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNSP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Romang Polong
Pada tanggal : 9 Agustus 2019
Dekan,



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 1603 Tahun 2019

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF) TAHUN 2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan Nuraeni NIM : 10400115020 Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi IH tanggal 29 Juli 2019 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tentang Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif

- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**, Sebagai Berikut :

NAMA / NIM	TEAM PENGUJI			PELAKSANA KET/SEK/ANGG
	MKDK/FIKIH & USUL FIKIH	MKDU/DIS	MKKP	
Nuraeni 10400115020	Dr. Azman, M.Ag.	Prof. Dr. H. Achmad Abu Bakar, M.Ag.	Sl. Nurjannah, S.H., M.H.	Dr. H. Abd. Halim Tali, M.Ag. Basyirah Mustafin, S.H., M.H. Nur Aisyah, S.H.I., M.H.I.

- Kedua** : Tugas Panitia mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Ketiga** : Tugas Penguji melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Keempat** : Tugas Panitia dan Penguji dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Kelima** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019;
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Romang Polong

Pada tanggal : 29 Juli 2019

Dekan

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa. (Sebagai Laporan)

Nomor : B-2760 /SH.01/PP.00.9/07/2019

Samata Gowa ٢٥ Juli 2019

Sifat : Penting
Lamp : Proposal
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth :
Ketua KPPU Kota Makassar
di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Nuraeni
Nim	: 10400115020
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan/prodi	: Ilmu Hukum
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Dato Panggentungang

Bermaksud melakukan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana., dengan judul skripsi :

"Penggunaan Indirect Evidence oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel (Studi Putusan KPPU Kota Makassar)."

Dosen Pembimbing :
1. Erlina, S.H., M.H.
2. Ashar Sinilele, S.H., M.H.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan Penelitian di Kantor KPPU Kota Makassar, terhitung mulai tanggal 26 Juli 2019 s.d. 26 Agustus 2019.

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan,

Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa
(Sebagai Laporan)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 9575 Tahun 2019

TENTANG

PANITIA, PEMBIMBING DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR PROPOSAL/SKRIPSI

TAHUN 2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan
Nama : Nuraeni
NIM : 10400115020
Jurusan : Ilmu Hukum
Hari/Tanggal : Selasa, 23 Juli 2019
Prihal : Ujian Seminar Proposal/Skripsi
Judul : "Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tidak Langsung oleh KPPU dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktek Kartel (Studi Kasus KPPU Kota Makassar))"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Proposal/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 25 Tahun 2013, Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Memberituk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Proposal/Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag
Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H.
Penguji I : Dr. Fadli Andi Natsif, M.H
Penguji II : ST. Nurjannah, S.H., M.H
Pelaksana : 1. Muh. Amzar, S.Ag
 2. Herawati, S.H
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Proposal/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2019;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Samata Gowa
pada tanggal 19 Juli 2019
Dekan,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 19521016 199003 1 003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

LEMBAR PENGESAHAN
DRAFT SKRIPSI

"Penggunaan Indirect Evidence Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam
Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel (Studi Putusan KPPU Kota Makassar)"

Disusun dan diajukan Oleh :

Nuraeni

NIM : 10400115020

Telah disetujui oleh pembimbing untuk melanjutkan
penulisan skripsi

Pada tanggal : Juli 2019

DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING

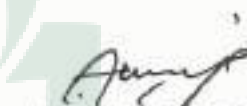
Pembimbing I



Erlina, S.H., M.H.

NIP. 19691219 200501 2 003

Pembimbing II



Ashar Sinilele, S.H., M.H.

NIP. 19690717 201411 1 001

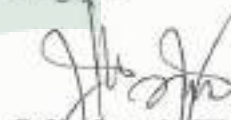
Penguji I



Dr. Fadli A. Natsif, S.H., M.H.

NIP. 19661016 201411 1 001

Penguji II



St. Nuriannah, S.H., M.H.

NIP. 19760822 200312 2 003

Mengesahkan,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum



Istiqamah, S.H., M.H.

NIP. 196801120 199503 2 001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

NIP. 19621016 199003 1 003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NURAENI lahir di Bongkitonro 14 Juli 1997, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Putri dari pasangan Kamaruddin dan Nur Lia ini memulai pendidikan dasarnya di SD INPRES PARIGI Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa pada tahun 2009. Gadis yang akrab disapa Eni ini melanjutkan Sekolah Menengah Pertamanya di SMPN 2 PARIGI pada tahun 2009 hingga tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan di SMAN 1 TINGGIMONCONG pada tahun 2012 hingga tahun 2015. Penulis kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan Program Studi Ilmu Hukum konsentrasi Hukum Perdata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R